

BAB II

TREN PERMASALAHAN DAN PENANGANAN ISU MIGRASI

AUSTRALIA PRA-SCOTT MORRISON

Selama dua dekade, permasalahan migrasi telah mengusik keamanan Australia. Meskipun Australia memiliki kewajiban internasional akan pemenuhan hak para imigran, namun semakin ke sini Australia merasa terancam akan lonjakan kedatangan imigran secara berkepanjangan. Tidak heran, jika permasalahan imigran di Australia direspons secara beragam oleh Perdana Menteri Australia. Bab ini secara khusus akan menunjukkan sepak terjang pemerintah Australia pra-Scott Morrison dalam menangani permasalahan migrasi. Sebab, upaya sekuritisasi akan isu migrasi telah menjadi warisan kebijakan Australia dari tahun ke tahun.

2.1. Agenda Migrasi Australia Abad ke-20 dan ke-21

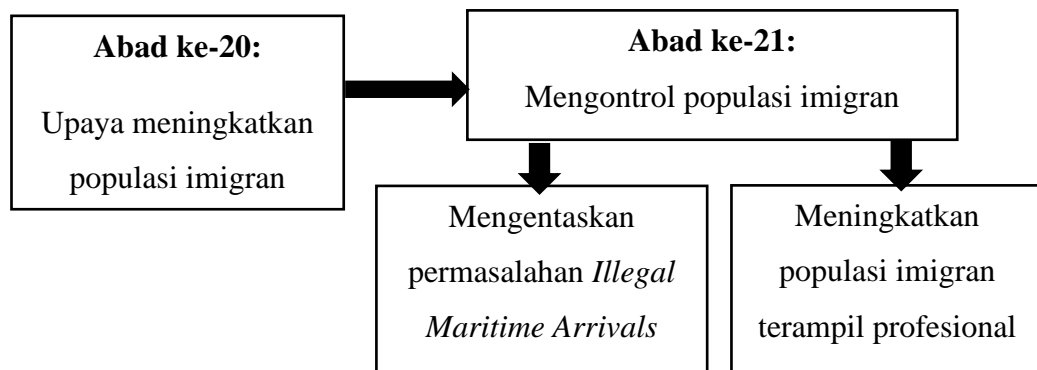
Bukan rahasia umum jika selepas Perang Dunia II (1939-1945), Australia mengalami lonjakan kedatangan imigran (National Museum Australia, 2022). Hal ini dikarenakan Australia tengah mengalami krisis populasi dan kekurangan tenaga kerja. Sebagaimana adagium Calwell, yakni “*populate or perish*” mau tidak mau pemerintah Australia harus menampung imigran, baik itu imigran kulit putih maupun non-kulit putih sekalipun. Sebab, jika Australia terus menerus melanjutkan Kebijakan Australia Putih, maka dapat dipastikan krisis populasi akan semakin parah dan hal ini tentu akan menghambat perkembangan ekonomi di Australia.

Pada abad ke-20, Australia sendiri telah mengalami tiga periode gelombang kedatangan imigran, yakni periode 1901-an, periode 1970-1990-an, dan pasca-

1970-an (Department of Immigration and Border Protection, 2017). *Pertama*, periode 1901-an merupakan periode awal di mana Australia mulai memberlakukan kebijakan “*Immigration Restriction Act*” atau “*White Australia Policy*”. Singkatnya, Australia menolak kedatangan imigran selain imigran kulit putih. Adapun alasan di balik Kebijakan Australia Putih ialah Australia hendak melanggengkan prinsip “*truly Australians*” atau mempertahankan kemurnian ras kulit putih. *Kedua*, periode 1950-1970-an, di mana pemberlakuan *White Australia Policy* mulai melemah. Sebab, periode ini merupakan periode awal di mana Australia berkenan menerima imigran non-kulit putih. Mayoritas imigran di Australia pada periode ini adalah *displaced persons*. Dalam ranah internasional, *displaced persons* merupakan para imigran yang melarikan diri dari negara asal karena perang, kerusuhan, dan juga pelanggaran kemanusiaan. Bahkan, pada periode ini pemerintah Australia meluncurkan kebijakan *Assisted Passage Scheme* dan *Employment of Scientific and Technical Enemy Aliens Scheme*. Adapun maksud dari kebijakan tersebut ialah mengontrak para praktisi dan ilmuwan kulit putih maupun non-kulit putih untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan agenda penyebarluasan industri dan juga ilmu pengetahuan di Australia. Sepanjang periode 1950-1970-an ini, Australia telah menampung lebih dari dua juta imigran, dan imigran merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar di Australia. *Ketiga*, periode kontemporer pasca 1970-an merupakan periode dimana Australia menghapus secara total kebijakan *White Australia Policy* dan memberlakukan *Universal Migration Policy*. Berpegang pada prinsip “*a multicultural society for the future*”, Australia tidak lagi membatasi imigran berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin,

etnis, agama, maupun kebangsaan. Namun, Australia menetapkan skema migrasi baru, yakni imigran harus memiliki keterampilan atau keahlian profesional guna mengisi kesenjangan tenaga kerja di Australia. Alhasil, pasca 1970-an, Australia mengalami lonjakan kedatangan imigran.

Jauh berbeda dari periode sebelumnya, di mana program migrasi Australia abad ke-20 lebih difokuskan pada upaya meningkatkan populasi, pada abad ke-21 ini Australia justru berupaya menekan populasi imigran, baik itu legal maupun ilegal. Lebih spesifik, agenda migrasi Australia dewasa ini ada dua yakni 1) memerangi *Illegal Maritime Arrivals*; dan 2) mendorong kedatangan imigran terampil serta profesional ke Australia agar lebih berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional jangka panjang .

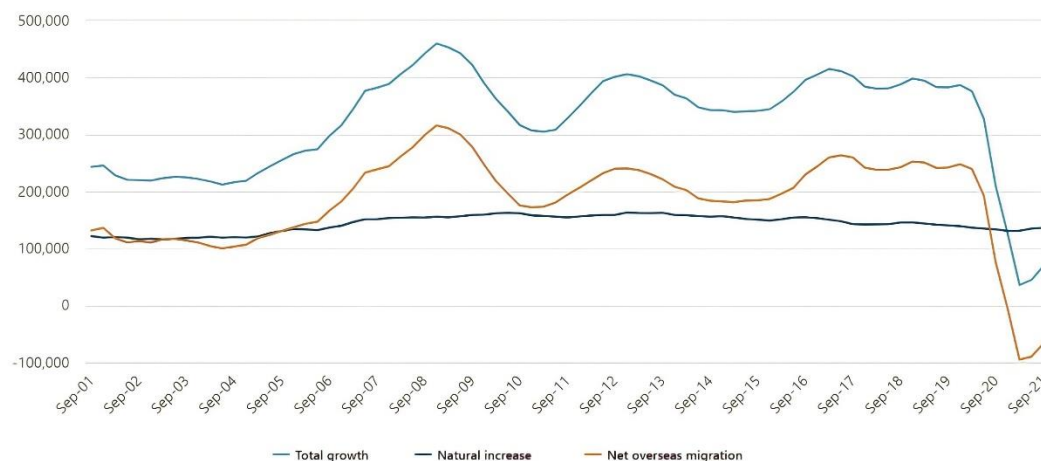


Gambar 2.1. Perbedaan Agenda Migrasi Australia Abad ke-20 dan ke-21

Sumber: telah diolah kembali dari Department of Immigration and Border Protection (2017)

Sekali lagi, agenda migrasi Australia pada abad ke-21 ini bukan saja memerangi *Illegal Maritime Arrivals*, melainkan juga meningkatkan populasi

imigran terampil dan profesional. Akan tetapi, pemerintah Australia menyadari bahwa kedatangan imigran tidak selalu menguntungkan. Bahkan, pemerintah Australia mulai cemas akan dampak berkepanjangan dari lonjakan kedatangan imigran di Australia.



Gambar 2.2. Tren Pertumbuhan Populasi Penduduk Alami dan Imigran Internasional di Australia Pada Juni 2001-Juni 2021
Sumber: Australian Bureau of Statistics (2021)

Tren kenaikan jumlah imigran di Australia sepanjang dua dekade terakhir ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah Australia. Di satu sisi, pemerintah Australia girang karena mendapat “*brain gain*” atas kehadiran imigran, namun di lain sisi, pemerintah Australia cemas akan keamanan masyarakat dan kedaulatan nasional Australia. Meskipun pemerintah Australia menerapkan sistem buka-tutup arus migrasi, jumlah imigran di Australia terus bertambah. Alhasil, lonjakan kedatangan imigran mempengaruhi populasi Australia. Merujuk pada laporan Australian Bureau of Statistics (2020), pertumbuhan populasi Australia setiap tahun dipengaruhi oleh dua hal, yakni pertumbuhan alami penduduk dan jumlah bersih

imigran internasional. Akan tetapi, merujuk pada gambar 2.2., maka dapat dipastikan bahwa penyumbang terbesar populasi di Australia adalah imigran.

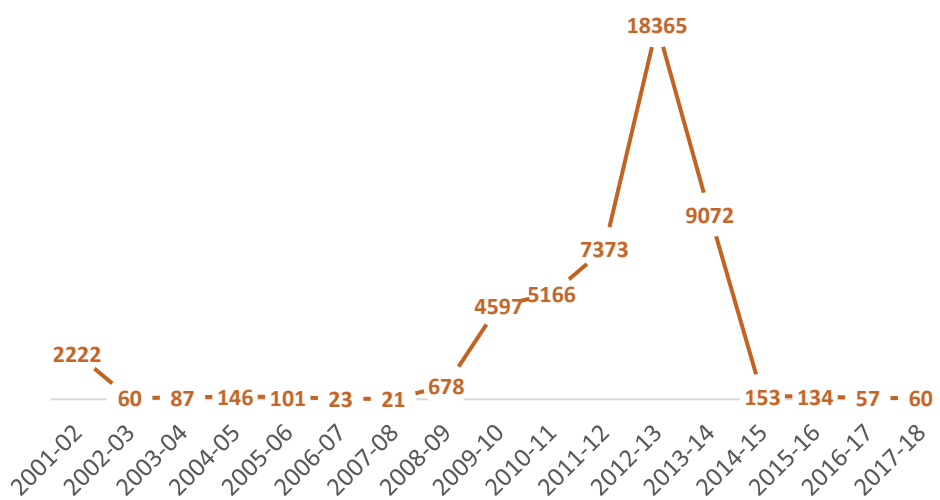
2.2. Warisan Masalah Migrasi Pra-Scott Morrison: *Illegal Maritime Arrivals*

Sayangnya, International Organization for Migrations (IOM) melaporkan bahwa pola kedatangan imigran di Australia pada awal abad ke-21 ini didominasi oleh *Irregular Maritime Arrivals* atau *Illegal Maritime Arrivals*, di mana perpindahan imigran tidak sejalan dengan norma peraturan negara terlibat, baik negara asal, transit, ataupun tujuan (McAuliffe & Mence, 2014). Keberadaan *Irregular Maritime Arrivals* atau *Illegal Maritime Arrivals* ini berpotensi besar menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas sosial, keamanan, dan ekonomi Australia. Sebab itu, Australia dengan sigap mengambil dua tindakan antisipasi. Pertama, mengganti istilah “*Irregular Maritime Arrivals*” menjadi “*Illegal Maritime Arrivals*”. Kedua, mengganti Department of Immigration and Citizenship menjadi Department of Immigration and Border Protection. Secara simbolik, kedua sikap Australia, baik itu mengubah istilah “*irregular*” menjadi “*illegal*” maupun mengganti nama departemen imigrasi cukup menunjukkan bahwa *Illegal Maritime Arrivals* merupakan permasalahan serius dan perlu penanganan khusus.

Merujuk pada United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), *Illegal Maritime Arrivals* berkaitan erat dengan pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi ialah individu yang diakui oleh Statuta UNHCR, Konvensi Organisasi Persatuan Afrika 1969, Konvensi 1951, dan Protokol 1967. Dalam arti, status pengungsi diakui oleh instrumen internasional. Sedangkan, UNHCR menyebutkan bahwa pencari suaka merupakan status yang diberikan kepada semua pihak yang

bermigrasi, baik atas motif ekonomi maupun kemanusiaan. Apabila klaim status pengungsi dari pencari suaka diterima oleh UNHCR (2021), maka pihak terkait akan mendapat sertifikat atau dokumen sah berstatus pengungsi. Namun, jika ditolak maka berhak mengajukan banding. Jika masih saja ditolak, maka pelamar akan tercatat sebagai imigran ilegal. Dengan kata lain, status pengungsi tidak diberikan begitu saja, melainkan ada persyaratan dan mekanisme tertentu. Sebab, tidak semua pihak yang bermigrasi itu berstatus sebagai pengungsi.

Lazimnya, para pengungsi dan pencari suaka masuk ke Australia melalui dua jalur, yakni udara dan laut (AHRC, 2012). Tepatnya, jalur udara menggunakan pesawat, sedangkan jalur laut menggunakan perahu atau kapal. Namun, kebanyakan pelaku *Illegal Maritime Arrivals* masuk ke Australia melalui laut. Berikut, paparan informasi terkait total kasus *Illegal Maritime Arrivals* di Australia selama kurang lebih satu setengah dekade:



Gambar 2.3. Tren Kasus *Illegal Maritime Arrivals* Pra-Scott Morrison

Sumber: telah diolah kembali dari Parliament of Australia (2015);

Refugee Council of Australia (2022)

Grafik 2.3 menunjukkan bahwa dari masa kepemimpinan John Howard bahkan sampai Malcolm Turnbull, Australia masih dihadapkan pada masalah *Illegal Maritime Arrivals*. Pada satu dekade pertama sejak pemberlakuan kebijakan pengetatan imigran, Australia mengalami lonjakan kedatangan imigran ilegal. Setidaknya, ada 13.101 total kasus *Illegal Maritime Arrivals* sejak 2001-2010. Kemudian, tiga tahun setelahnya Australia justru semakin mengalami lonjakan kedatangan imigran ilegal, yakni mencapai 34.810 kasus. Namun, tahun-tahun selanjutnya jumlah kasus imigran ilegal semakin menurun. Tren kasus *Illegal Maritime Arrivals* memang tampak fluktuatif, namun hal ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masalah *Illegal Maritime Arrivals* merupakan masalah serius dan sangat potensial mengancam keamanan serta kualitas hidup Australia.

Sebenarnya, ada dua faktor utama mengapa pencari suaka dan pengungsi bermigrasi ke Australia (Productivity Commission, 2016). Pertama, *push factor* (faktor pendorong), yakni kondisi ketika pencari suaka dan pengungsi ingin meninggalkan negara asal dikarenakan adanya kekacauan dan ketidakstabilan seperti adanya perang, konflik, maupun bencana. Kedua, *pull factor* (faktor penarik), yakni kondisi ketika pencari suaka dan pengungsi terpicu pada daya tarik dari Australia dikarenakan Australia dipandang lebih memfasilitasi kelayakan dan keselamatan hidup ketimbang negara asal. Merujuk pada publikasi *Australia's Welfare Indicators* (2021), dapat dibenarkan bahwa Australia memang memiliki kualitas kesejahteraan sosial dan lingkungan, sarana pendidikan dan keterampilan, serta keberhasilan ekonomi dan pekerjaan lebih baik. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa motif kebanyakan pengungsi dan pencari suaka ialah *push factor*,

lebih tepatnya mencari perlindungan dan keamanan internasional. Akan tetapi, *pull factor* memotivasi para pencari suaka dan pengungsi untuk bermigrasi ke Australia.

2.3. Sepak Terjang Penanganan Isu Migrasi Pra-Scott Morrison

Sejauh ini, persoalan migrasi di Australia dikonstruksi menjadi isu keamanan dan direspons secara beragam oleh Pemerintah Australia. Mulai dari masa kepemimpinan John Howard (1996-2007) hingga Scott Morrison (2018-2022), Australia tetap mengencangkan kebijakan restriktif dan membingkai masalah migrasi sebagai ancaman krusial bagi masa depan populasi Australia. Kebijakan masing-masing perdana menteri pra-Scott Morrison dalam menangani permasalahan migrasi pun berbeda-beda. Namun, tidak jauh-jauh dari dua hal, yakni kebijakan restriktif tapi tetap mengedepankan aspek kemanusiaan atau kebijakan restriktif tapi mengesampingkan nilai kemanusiaan. Tidak jarang, kebijakan migrasi pra-Scott Morrison mendapat pertentangan publik. Akan tetapi, setiap perdana menteri pra-Scott Morrison tetap mewarisi kebijakan restriktif isu migrasi meskipun dimodifikasi sesuai orientasi masing-masing pemimpin.

Secara historis, kebijakan restriktif terkait migrasi di Australia pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri John Howard (1996-2007), tepatnya pada 2001. Fokus agenda migrasi Australia di bawah kepemimpinan John Howard ialah memerangi permasalahan *Irregular Maritime Arrivals* atau migrasi tidak teratur di mana perpindahan imigran tidak sejalan dengan norma peraturan negara terlibat, baik negara asal, transit, maupun tujuan (Phillips & Spinks, 2011). Pola migrasi tidak teratur tersebut dianggap mendatangkan masalah bagi Australia terutama dalam aspek keamanan, ekonomi, dan sosial. Bergegas menangani permasalahan

Irregular Maritime Arrivals, John Howard menggencarkan *hard policy*, seperti *Border Protection Act 2001*, *Pacific Solution*, pengolahan lepas pantai, dan pemberlakuan visa proteksi (Septa, 2018). Singkatnya, John Howard memperkenalkan konsep pemrosesan lepas pantai melalui pihak ketiga di mana klaim para pencari suaka terkait permohonan status pengungsi akan diolah di luar yurisdiksi Australia. Kemudian, kapal pengangkut imigran ilegal akan dialihkan pada negara ketiga di kawasan Pasifik, tepatnya di Pulau Nauru dan Pulau Manus. Secara sederhana, kebijakan migrasi John Howard menegaskan pada tiga aspek penting (Alunaza, Maulana, & Sudagung, 2018). *Pertama*, John Howard hendak menghilangkan zona migrasi di Australia. *Kedua*, John Howard berusaha memperkuat kerja sama antar negara terutama terkait pembangunan pusat penahanan *Irregular Maritime Arrivals* di Pulau Nauru dan Manus. *Ketiga*, John Howard berupaya menetapkan sejumlah amandemen Undang-Undang Migrasi guna mengurangi hak para imigran. Seluruh kebijakan migrasi John Howard menunjukkan bahwa Australia memang mementingkan isu migrasi ke dalam kerangka keamanan. Selama memimpin, John Howard memang mampu menekan kedatangan imigran ilegal menjadi 2600 kasus (Parliament of Australia, 2015).

Di masa kepemimpinan Kevin Rudd (2007-2010), kebijakan *Pacific Solution* dan pemberian visa proteksi dihapuskan (ABC News, 2019). Kevin Rudd berupaya menjalankan kebijakan restriktif, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Kevin Rudd berpegang pada kebijakan lunak. Terbukti, Kevin Rudd justru memperkenalkan sistem *New Direction in Detention Policy*, di mana pemerintah Australia membantu memproses ulang status pengungsi yang gagal

sampai pengungsi tersebut mendapat status sah (Karlsen, 2010). Selama menjabat, Kevin Rudd juga menghindari penggunaan istilah “ilegal” dalam menyebut pencari suaka tanpa dokumen sah. Hal ini guna memanusiakan para pencari suaka maupun pengungsi. Lebih lanjut, Kevin Rudd juga memberikan visa permanen kepada pengungsi, dan pusat penahanan imigran di Pulau Christmas kembali diberdayakan. Jika merujuk pada laporan Parliament of Australia, pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd tidak berhasil menekan kedatangan imigran ilegal ke Australia. Terbukti, *Irregular Maritime Arrivals* di Australia justru meningkat sebanyak 699 jiwa dari periode John Howard (Parliament of Australia, 2015).

Pasca Kevin Rudd, Julia Gillard (2010-2013) bersikap lebih hati-hati dan cenderung menempatkan diri di tengah-tengah kebijakan keras John Howard dan kebijakan lunak Kevin Rudd. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Julia Gillard berupaya memperlakukan imigran, pengungsi, dan pencari suaka secara lembut. Oleh demikian, Julia Gillard mengeluarkan sejumlah kebijakan migrasi terkait, yakni mengembangkan kebijakan regional atau *Regional Protection Framework*, membuka kembali pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru, menunda pemrosesan visa perlindungan dalam jangka waktu sekitar 4-5 tahun, serta menjalankan program kemanusiaan (Husein, 2016). Julia Gillard memandang bahwa *Regional Protection Framework* lebih efektif dan berdampak panjang dalam menangani permasalahan imigran (Prastya & Yuniati, 2015). Sebab, pemerintah Australia beserta negara tetangga seperti Indonesia, Papua Nugini, Malaysia, Selandia Baru, serta berbagai *stakeholders* termasuk United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for

Migration (IOM) bisa lebih intens dalam membuat kerangka perlindungan Kawasan (Crock, 2014). Selanjutnya, kerangka perlindungan kawasan tersebut dikembangkan ke dalam agenda *Bali Process* pada 2011.

Semula, Julia Gillard memang menjalankan kebijakan lunak sebagaimana Kevin Rudd, namun kelembutan kebijakan migrasi Julia Gillard tersebut justru menyebabkan peningkatan kasus *Irregular Maritime Arrivals* di Australia, tepatnya 12.539 kasus pada 2010-2012 (Houston, Aristotle, & L'Estrange, 2012). Bahkan, persentase kedatangan imigran tidak teratur di Australia pada masa Julia Gillard mencapai lebih dari 100% ketimbang tahun lalu (Oriti, 2015). Merespons hal ini, Julia mulai menetapkan kebijakan pengembalian kapal dan '*No Document No Entry*'. Harapannya, kebijakan tersebut dapat menekan laju *Irregular Maritime Arrivals* di Australia. Akan tetapi, kebijakan migrasi Julia Gillard terbilang lambat dan tidak berhasil menekan lonjakan *Irregular Maritime Arrivals*. Terbukti, Australia justru mengalami lonjakan *Irregular Maritime Arrivals*, yakni 18.365 kasus (Parliament of Australia, 2015). UNHCR (2013) pun membenarkan bahwa Australia mengalami peningkatan kedatangan imigran, pengungsi, dan pencari suaka secara drastis pada masa Julia Gillard.

Akibat lonjakan kasus migrasi tidak teratur pada masa kepemimpinan Julia Gillard, Kevin Rudd (2013) di masa pemerintahan kedua ini mau tidak mau harus mengambil langkah lebih agresif, yakni menjalankan kebijakan restriktif tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Jika di periode kepemimpinan pertama menerapkan *soft policy*, di periode kedua ini Kevin Rudd justru mempraktikkan kebijakan keras *Offshore Processing Centre* (Phillips & Spinks, 2013). Terkait ini,

Kevin Rudd menilai bahwa kebijakan lunak tidak cocok jika diterapkan dalam menangani permasalahan isu migrasi di Australia. Terbukti, di masa kepemimpinan pertama justru terjadi lonjakan kedatangan imigran. Agenda dari kebijakan migrasi kedua Kevin Rudd tidak lain untuk menekan sekaligus menghentikan eskalasi kasus *Irregular Maritime Arrivals* di Australia. Kebijakan tersebut mencakup tindakan mengirimkan para pelaku migrasi tidak teratur ke pusat penahanan imigran tanpa melalui proses seleksi. Singkatnya, Australia tidak menerima ataupun menampung pengungsi dan pencari suaka. Secara khusus, Kevin Rudd juga mengalokasikan dana sebesar \$200,000 guna menggali informasi terkait jaringan penyelundupan manusia (Hall & O'Brien, 2013). Kebijakan migrasi Kevin Rudd pada periode kedua ini terbilang berhasil dan mampu menekan lonjakan kedatangan imigran ilegal, yakni sebanyak 9.072 kasus.

Masuk pada pemerintahan Tony Abbott (2013-2015), isu migrasi di Australia kembali dikemas ke dalam kebijakan restriktif dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. Tony Abbott berpandangan bahwa Australia tengah berada pada posisi “*national emergency*” atau tengah menghadapi krisis perlindungan perbatasan. Oleh karena itu, Tony Abbott kembali menghidupkan kebijakan *Operation Sovereign Borders, Turn Back the Boat*, menetapkan induk pemrosesan lepas pantai melalui negara ketiga (Manus, Nauru, dan Pulau Christmas), serta memberlakukan kembali pemberian visa proteksi (Santoso, 2020). Meskipun maksud kebijakan pengembalian kapal Tony Abbott merupakan tindakan menyingkirkan kapal-kapal ilegal secara damai keluar dari Australia, namun dalam pelaksanaannya, kebijakan *Operation Sovereign Borders* justru bertentangan

dengan prinsip *non-refoulement* Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Tully & Smith, 2015). Alhasil, kebijakan Tony Abbott banyak mendapat pertentangan dan penolakan publik. Pada masa kepemimpinan Tony Abbott pula, istilah penyebutan *Irregular Maritime Arrivals* diubah menjadi *Illegal Maritime Arrivals*. Tindakan Tony Abbott ini semakin menegaskan bahwa isu migrasi merupakan isu serius bagi keamanan Australia. Dengan tegas, Tony Abbott mengumumkan bahwa ‘manusia perahu’ tidak akan pernah mendapatkan hak menetap atau bermukim di Australia dalam situasi apapun (Ardianti, 2015). Di samping itu, Tony Abbott beranggapan bahwa kebijakan pencegahan *Illegal Maritime Arrivals* tidak cukup jika hanya ditangani dengan kerja sama regional. Oleh demikian, Tony Abbott mempraktikkan *Regional Deterrence Framework*, yakni pendekatan unilateral Australia demi melindungi keamanan nasional dengan mengoptimalkan keberadaan negara-negara tetangga (MacCallum, 2013). Dengan begitu, Tony Abbott berhasil menekan 287 kasus kedatangan imigran ilegal ke Australia (Refugee Council of Australia, 2022).

Melihat rekam jejak para Perdana Menteri Australia dalam merespons isu migrasi, Malcolm Turnbull (2015-2018) turut mewarisi kebijakan restriktif, namun tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Bukan saja memadukan kebijakan *Operation Sovereign Border* dengan program kemanusiaan, Malcolm Turnbull juga memainkan peran sebagai aktor utama pemberantas kasus penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik melalui *Bali Declaration*, menerapkan model terbuka pemrosesan lepas pantai di Nauru, mengimplementasikan kesepakatan *United Nations Summit for Refugees and Migrants*, menjalin perjanjian pemukiman kembali di negara ketiga bersama

Amerika Serikat, serta menutup tujuh belas akses detensi imigrasi darat (Karlsen & Phillips, 2017). Tentu, kebijakan tersebut tetap mengedepankan aspek kedaulatan Australia. Peter Dutton selaku Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan menambahkan bahwa kebijakan *Operation Sovereign Borders* pada masa Malcolm Turnbull sengaja dirancang guna melindungi para imigran yang notabene rentan dieksploitasi sekaligus menekan angka kematian imigran di laut di samping memelihara perbatasan wilayah (Saraswati & Farabi, 2019). Pada periode kepemimpinan Malcolm Turnbull, kasus *Illegal Maritime Arrivals* dapat ditekan menjadi 117 kasus (Refugee Council of Australia, 2022).

Tabel 1. 1. Ragam Kebijakan dan Capaian Agenda Sekuritisasi Isu Migrasi Pra-Scott Morrison

No	Perdana Menteri	Upaya Sekuritisasi
1	John Howard (1996-2007)	Kebijakan Keras
		1. <i>Border Protection Act 2001</i> 2. Pemberlakuan <i>Temporary Protection Visa</i> 3. Pemrosesan lepas pantai melalui <i>Pacific Solution</i>
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Irregular Maritime Arrivals</i> turun jadi 2.600 kasus
2	Kevin Rudd (2007-2010)	Kebijakan Lunak
		1. <i>Temporary Protection Visa</i> dihapuskan 2. <i>Pacific Solution</i> ditiadakan 3. Pemberlakuan <i>New Direction in Detention Policy</i>
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Irregular Maritime Arrivals</i> turun jadi 699 kasus
3	Julia Gillard (2010-2013)	Kebijakan Lunak
		1. Mengaktifkan <i>Regional Protection Framework</i> 2. Membuka kembali pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru 3. Menunda pemrosesan <i>Temporary Protection Visa</i> 4. Program kemanusiaan
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Irregular Maritime Arrivals</i> meningkat 12.539 kasus

No	Perdana Menteri	Upaya Sekuritisasi
		Kebijakan Keras
		<i>'No Document No Entry'</i>
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Irregular Maritime Arrivals</i> meningkat 18.365 kasus
4	Kevin Rudd (2013)	Kebijakan Keras
		<i>Offshore Processing Centre</i>
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Illegal Maritime Arrivals</i> turun menjadi 9.072 kasus
5	Tony Abbott (2013-2015)	Kebijakan Keras
		1. <i>Operation Sovereign Borders</i>
		2. <i>Turn Back the Boat</i>
		3. Induk pemrosesan lepas pantai melalui negara ketiga <i>Protection Visa</i>
		4. <i>Regional Deterrence Framework</i>
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Illegal Maritime Arrivals</i> turun jadi 287 kasus
6	Malcolm Turnbull (2015-2018)	Kebijakan Keras
		1. <i>Operation Sovereign Border</i>
		2. <i>Bali Declaration</i>
		3. Model terbuka pemrosesan lepas pantai
		4. Implementasi <i>United Nations Summit for Refugees and Migrants</i>
		5. Perjanjian pemukiman kembali di negara ketiga bersama Amerika Serikat
		6. Menutup tujuh belas akses detensi imigrasi darat
		Capaian Sekuritisasi
		<i>Illegal Maritime Arrivals</i> turun menjadi 117 kasus

Sumber: telah diolah kembali dari Philips dan Spinks (2013); Prabaningtyas (2015); dan Phillips (2017)

Berdasarkan keterangan pada tabel 1.1., maka dapat dipahami bahwa pemerintah Australia pra-Scott Morrison memang aktif mengencangkan ragam kebijakan sekuritisasi migrasi. Meskipun fluktuatif, tabel 1.1. cukup menunjukkan bahwa capaian agenda sekuritisasi migrasi pra-Scott Morrison dapat menekan kasus *Illegal Maritime Arrivals* dalam beberapa tahun terakhir ini.